

PERAN HAMENGGU BUWONO IX DALAM PERJUANGAN AWAL KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (1945-1949)

Jamaludin Leu^a, Anggar Kaswati^b, Suharman^c

^{abc}Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, IKIP PGRI Wates

Jalan KRT Kertodiningrat, No. 5, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

ABSTRAK

Awal kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan suasana mencekam yang disebabkan oleh keganasan tetara NICA (Belanda). Pada bulan Oktober, November, dan Desember 1945, Jakarta menjadi ajang kekerasan dan teror yang menyebabkan jatuh korban orang Indonesia yang tidak berdosa, tidak kuang dari 8.000 orang, bahkan ancaman juga terjadi pada Soekarno-Hatta sehingga mereka harus tidur berpindah-pindah rumah. Terlihat kondisi Jakarta terasa begitu gawat sehingga pada sidang Kabinet tanggal 3 Januari 1946 diambil keputusan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat Republik Indonesiabke Yogyakarta. Sehingga pada pagi hari tanggal 4 Januari 1946 pusat pemerintahan resmi pindah ke Yogyakarta, dan pada akhirnya pimpinan Republik disambut hangat oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Mulai waktu itulah Yogyakarta menjadi ibu kota revolusi yang sanggup bertahan mengatasi gelombang pasang-sururnya perjuangan pada tahun-tahun berikutnya. Sultan Hamengku Buwono IX juga menjadi anggota Kabinet Sjahrir III sebagai Menteri Negara pada tahun 1946. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia diberbagai daerah yang didirikan LaskarRakyat untuk membantu TNI dalam menanggulangi musuh. Terkecuali Yogyakarta, yang berhasil membentuk tanpa didominasi oleh suatu golongan, melainkan gabungan dari berbagai unsur yang menjadi panglimanya adalah Sultan Hamengku Buwono IX sendiri dengan kepala stafnya Selo Soemardjan.

Kata Kunci: Hamengku Buwono IX, Kemerdekaan, Republik Indonesia, 1945-1949

LATAR BELAKANG

Pembacaan proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal kemerdekaan republik Indonesia. Proklamasi ini disambut baik oleh seluruh masyarakat, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kesultanan Yogyakarta. Ketika mendengar kabar tentang kemerdekaan Indonesia beliau langsung mengirim surat kawat (*telegram*), ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia sekaligus mendukung penuh lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menandai penyatuan dua Negara yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Republik Indonesia. Kemudian Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan amanat pada

tanggal 5 September 1945, yang isinya kesultanan Yogyakarta melebur dalam satu Kesatuan Republik Indonesia (Mohamad Roem, dkk 1982:60-63).

Pemerintahan pusat mengirimkan utusan ke Yogyakarta untuk menyampaikan sambutan positif. Sehingga pada tanggal 6 September 1946, piagam penetapan mengenai kedudukan Yogyakarta dalam lingkungan Republik Indonesia ditanda tangani oleh Presiden Soekarno. Penandatanganan piagam ini menjadi tanda kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Banyak peran Sultan dalam mendukung upaya kemerdekaan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ketika, pengepungan ekonomi yang dilakukan Belanda membuat perdagangan dengan luar Negeri terhambat. Yang mengakibatkan kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi dimana-mana, termasuk Yogyakarta. Oleh karena itu untuk menjamin agar roda perekonomian RI tetap berjalan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyumbang sedikit kekayaannya kepada Indonesia sekitar 6.000.000 Gulden, untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai lainnya.

Sultan Hamengku Buwono IX menawarkan kepada pemerintahan pusat untuk memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pemerintahan pusat menerima tawaran tersebut. Pada tanggal 4 Januari 1946 Ibu Kota Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta sehingga Yogyakarta menjadi Ibu Kota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi benteng pertahanan Republik Indonesia muda. Rakyat bersama-sama dengan Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menjadi pelaku perjuangan untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Hamengku Buwono IX akhirnya memasuki arena politik Nasional, dan kehadiran pertamanya dalam pertemuan kabinet di tahun 1946 adalah awal keterlibatan dirinya dalam perpolitikan nasional dan berakhirnya keterlibatan beliau dalam pertemuan kabinet pada tahun 1978. Selain di bidang politik Sultan Hamengku Buwono IX ditetapkan sebagai bapak pramuka Indonesia dengan menyandang medali *Bronze Wolf* dari organisasi Resmi *World Scout Committee* (WCS). Sebagai pengakuan atas sumbangsih seorang individu kepada kepanduan dunia (Mohamad Roem, dkk 1982:64).

Metode

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode historis. Tahapan penelitian historis menurut Kuntowijoyo (2013) terdiri atas lima tahapan yaitu, 1) pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi (kritik sumber), 4) interpretasi (analisis dan sintesis), 5) historiografi (penulisan sejarah).

Hasil dan Pembahasan

a. Yogyakarta Pada Masa Awal Kemerdekaan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah otonomi setingkat provinsi yang dikepalai Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah DIY. Undang-undang yang membentuk Yogyakarta menjadi Daerah otonomi adalah Undang-undang No. 3 tahun 1950. Pada jaman penjajahan Belanda, status Kesultanan Yogyakarta tidak diatur dengan undang-undang, melainkan diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jendral Belanda dengan Sri Sultan.

Perjanjian ini dinamakan politik-Contract. Raja-raja yang memerintah di Kasultanan Yogyakarta harus terikat dengan suatu kontrak politik (*politik-contract*) dengan pemerintah Belanda. Sultan yang menduduki takhta sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta tetap memegang pemerintahan atas daerahnya, tetapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah Papatih Dalem. Papatih Dalem juga bertanggungjawab kepada Gubernur maupun kepada Sultan, dan oleh karenanya mendapat gaji dari Belanda dan Kasultanan.

Pada bulan Januari 1942 pasukan Jepang yang diarahkan ke Indonesia untuk melumpuhkan pasukan Hindia Belanda sehingga terjadi pertempuran di laut Jawa yang membawa keunggulan armada Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang di bawah pimpinan Panglima tertinggi (*Saiko Sisikan*), Letnan Imamura Hitsoji mendarat di teluk Banten. Pasukan Jepang yang berpangkalan di Banten dan Indramayu dengan cepat melakukan penyerangan ke Kalijati, dan Batavia tidak luput dari serangan Bom tentara Jepang yang melalui udara, sehingga pada tanggal 7 Maret 1942 Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta sudah diduduki Jepang (Adrian Vickers, 2011:131)

Periode Jepang membuat banyak perubahan besar terhadap kehidupan orang Indonesia. Para pejabat Indonesia mendapatkan kepercayaan diri saat menduduki

berbagai jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Belanda. Pihak Jepang semakin memperdaya orang Indonesia dengan kemungkinan kemerdekaan politik, namun hal ini tetap berada di masa depan yang tidak pasti. Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan HB IX kemudian segera memanggil Paku Alam VIII dan K.R.T. Honggowongso yang merupakan staf senior di Kepatihan. Sultan meminta pertimbangan mengenai bagaimana sikap Yogyakarta sebaiknya. Paku Alam kemudian mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan hal yang telah dicita-citakan. Beliau memberikan saran bahwa sebaiknya Yogyakarta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan di Jakarta (Suhartono, 1994:118-119).

Sultan mengucapkan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945 Sultan kembali mengirim telegram yang kali ini dikirim berdasarkan kedudukannya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (*Hokokai*) Yogyakarta. Telegram tersebut ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Pada awal tahun 1946 Ibu Kota Republik Indonesia resmi pindah ke Yogyakarta, disebabkan karena kondisi beberapa wilayah termasuk Jakarta tidak stabil. Namun bukan hanya perpindahan Ibu Kota, tetapi ada sejumlah orang-orang yang datang dari berbagai wilayah yang ikut mengungsi ke Yogyakarta yang mereka anggap keamanannya relatif stabil dibandingkan wilayah lain. Akibat dari pengungsian tersebut mengakibatkan penduduk Yogyakarta pun melonjak drastis. Pada tahun 1930 mencatat sebanyak 1.558.844 jiwa. Lalu pada tahun 1949, jumlahnya bertambah dengan signifikan menjadi 1.784.304.

Penduduk asli dan para pengungsian yang tinggal di Yogyakarta, mengalami kekurangan ekonomi yang sangat buruk, sehingga mereka mengkonsumsi berbagai dedaunan serta buah-buahan untuk mengganjal perut. Kondisi ekonomi memang kacau pada saat itu sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru, seperti masalah kesehatan, dan masalah sosial, yang terus-menerus menerpa berbagai kalangan masyarakat mulai dari menengah atas hingga menengah bawah.

Kondisi masyarakat pada saat itu terekam jelas dalam sanubari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, telah lama rakyat mengidamkan kemerdekaan. Rakyat rela

berkorban demi mempertahankan kedaulatan Bangsa. Pada Agresi militer Belanda 19 Desember 1948 jelas melukai hati rakyat. Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian berpikir keras untuk memutuskan harus dilakukan tindakan, agar kedaulatan bangsa kembali berdiri tegak.

Sebelumnya, kedatangan VOC ke Jawa mereka ingin membuat kontrak perjanjian dengan Kerajaan Mataram. Asal mula perjanjian itu hanya memuat pasal-pasal mengenai perdagangan, sama sekali tidak menyentuh lapangan politik sesuai dengan tujuan semula VOC. Walaupun kemudian VOC mengangkat Paku Buwono III dengan akibat menimbulkan ketegangan antara dua pihak, VOC pun yang mengusulkan untuk menghentikan perang saudara dan membuat suatu perjanjian, pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian antara Belanda dengan Kerajaan Mataram ditanda tangani di desa Giyanti maka perjanjian itu dinamakan perjanjian Giyanti. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Daerah sebelah timur Sungai Opak menjadi bagian Susuhunan Paku Buwono III yang tetap berkedudukan di Surakarta. Daerah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono I dan berkedudukan di Yogyakarta (Djoko Suryo.,tt, :58).

Dengan terlaksananya perjanjian seperti itu tamatlah riwayat Kerajaan Mataram, walaupun dikemudian hari masih disebut-sebut tetapi itu hanya sisa nama saja. Secara *de facto* dan *de jure* sejak itu sesungguhnya Mataram adalah milik VOC (Mohamad Roem dkk, 1982:124).

Setelah proklamasi kemerdekaan, di seluruh Indonesia dibentuk sebuah badan bernama Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah atau disingkat dengan KNID. Tugasnya yaitu membantu pemerintah setempat dalam menjalankan pemerintahan (Mohamad Roem, dkk, 1982:63).

b. YOGYAKARTA SEBAGAI IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA

Situasi Jakarta yang tidak aman maka dianggap waktunya Ibu Kota RI berhijrah ke Kota yang lebih aman untuk melakukan pimpinan perjuangan. Pada tanggal 3 Januari 1946 Presiden Soekarno mengumumkan kepada para menteri, pengawal, dan pembantu-

pembantu yang setia bahwa kedudukan pemerintahan harus dipindahkan ke daerah yang bebas dari gangguan Belanda.

Pemerintah RI memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta meninggalkan Jakarta diikuti oleh pimpinan-pimpinan pemerintahan pusat. Sedangkan Perdana Menteri Syahrir tetap tinggal di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yogyakarta dipilih sebagai Ibu Kota RI berdasarkan pertimbangan adanya dukungan dari Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman serta rakyat Yogyakarta terhadap Pemerintah RI.

Kesultanan Yogyakarta sebagai pusat pergerakan (revolusi) yang tidak lepas dari peran Sultan Hamengku Buwono IX. Kebesaran hati Sultan membuktikan bahwa beliau bukan hanya seorang bangsawan, melainkan juga negarawan yang berpikir maju. Kerelaan untuk menyediakan Gedung Agung untuk menjalankan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan wujud janji Sultan untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Ketegasan seorang Sultan untuk menopang perjuangan Soekarno-Hatta serta jaminan keamanan oleh masyarakat saat itu menjadi penentu nasib RI selanjutnya. Menjadikan Yogyakarta sebagai Ibu Kota merupakan suatu pilihan yang tepat. Semangat kemerdekaan yang tinggi dari penduduk dan yang ditunjang oleh sikap tegas dari Sri Sultan merupakan modal yang sangat besar. Yogyakarta berada dalam suasana demam kemerdekaan, sehingga nampak rakyatnya menyambut peristiwa itu dengan semangat yang tinggi. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan satu kesatuan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya setia dan tunduk kepada Negara Republik Indonesia (Mohamad Roem, dkk, 1982:66-67).

Pandangan Hamengku Buwono IX Terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia

Pidato Sultan Hamengku Buwono IX pada hari pelantikan raja merupakan gambaran jelas bahwa Sultan memiliki keinginan dan pemikiran kuat tentang kemerdekaan. Hal ini diperkuat lagi dengan janji dalam penutupan pidatonya, *“Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”*. Melalui pernyataan dan janji dalam pidatonya

tersebut tersirat bahwa Sultan sangat terikat kuat dengan kultur budaya serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyatnya (Julius Pour dkk, 2012:23).

Dengan pandangannya yang tidak sepeham dengan komunisme, menganggap pemilihan Roestam dari kalangan komunis akan memunculkan kebebasan yang berlebihan. Semua hal ini kemudian menjadikan Sultan Hamengku Buwono IX bertransformasi secara utuh sebagai seorang nasionalis sejati. Tidak hanya pada saat pidato pelantikannya saja, sikapnya yang nasionalis dengan segala kematangan serta kedalaman pemikiran yang melatarbelakanginya juga ditunjukkan pada masa dimulainya invasi Jepang ke Indonesia tahun 1942. Sultan tak ingin Jepang langsung menguasai Yogyakarta, dan menginginkan segala sesuatu harus dibicarakan terlebih dahulu kepada Sultan, agar wewenang untuk memerintah rakyat kerajaannya dapat dilakukannya secara langsung.

Proses didikan yang keras dan disiplin telah membentuk sikap dalam diri seorang Sultan Hamengku Buwono IX. Kemampuan Bahasa, memudahkan beliau mempelajari dengan baik ilmu-ilmu yang ia dapat yang kemudian mengembangkan pemikiran kritisnya sendiri. Dengan membandingkan teori yang ia dapat dengan praktik yang ia saksikan sendiri telah menumbuhkan kerangka pemikiran yang kritis kemudian menjadi latar belakang dalam pemikirannya akan cita-cita kemerdekaan yang ia dan seluruh rakyat idamkan.

c. Respon Hamengku Buwono IX Terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI

Proklamasi ini disambut baik oleh seluruh masyarakat, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kesultanan Yogyakarta. Ketika mendengar kabar tentang kemerdekaan Indonesian beliau langsung mengirim surat kawat (*telegram*), ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia sekaligus mendukung penuh lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mohamad Roem, dkk, 1982:60).

Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan HB IX kemudian segera memanggil Paku Alam VIII dan K.R.T. Honggowongso yang merupakan staf senior di Kepatihan. Sultan meminta pertimbangan mengenai bagaimana sikap Yogyakarta sebaiknya. Paku Alam kemudian mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan hal yang telah dicita-citakan. Beliau memberikan saran bahwa sebaiknya

Yogyakarta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan di Jakarta.

d. Dukungan Hamengku Buwono IX terhadap Lahirnya Negara Republik Indonesia

Pada tanggal 18 Maret 1940, jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, sikapnya yang tegas mendukung RI sejak proklamasi, jauh mendahului orang lain yang ragu-ragu terhadap nasib RI, yang membuat semua orang menghormatinya. Hal ini masih di tambah lagi dengan peranannya yang tidak berhenti sepanjang Sejarah RI (Moedjanto. G, 1987:125).

Pernyataan Hamengku Buwono IX dalam menyambut Proklamasi dengan ucapan terima kasih kepada Jepang yang sebelumnya selalu ada dalam pesan-pesannya selama tiga tahun terakhir. Hamengku Buwono IX mengadakan sebuah pertemuan Hokokai Yogyakarta, yang menetapkan bahwa wilayah itu mendukung kepemimpinan nasional, “dengan segenap kekuatan mereka”. Dari berbagai macam pertemuan tersebut dan dari suara-suara opini populer lainnya, menjadi bukti bahwa publik sangat menyetujui keputusan-keputusan yang di ambil oleh Hamengku Buwono IX. Antusiasme rakyat Yogyakarta akan kemerdekaan telah ditunjukkan sejak janji kemerdekaan oleh Perdana Manteri Koiso dalam sebuah pertemuan besar pada bulan September 1944 sebelumnya (John Monfries, 2018:178).

e. Perjuangan yang dilakukan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Semangat rakyat terutama pemuda untuk mengusir para penjajah tampaknya masih terus berkobar, meskipun kekuasaan sudah berada ditangan bangsa Indonesia, karena adanya ancaman dari bangsa Belanda yang membonceng Sekutu khususnya Inggris. Ancaman dialami dan dirasakan sendiri oleh rakyat di Yogyakarta (Suwarno, P. J, 1994:189).

Kebijaksanaan Hamengku Buwono IX dalam mengakomodasikan Gerakan rakyat dengan Maklumat No. 5/1945, sekaligus dapat dikembangkan menjadi pertahanan rakyat yang tersusun rapi. Sejak di keluarkannya Maklumat No. 5/1945 itu

(tanggal 26 Oktober) pembentukan Laskar Rakyat di Kabupaten *Kapanewon*, dan desa-desa terus di galakkan. Hamengku Buwono IX sendiri menggerakkan *Abdi Dalem* dan para Bangsawan serta saudara-saudaranya masuk menjadi anggota Laskar Rakyat.

Pada bulan Agustus, Hamengku Buwono IX telah mengumumkan bahwa pemuda yang ingin membantu Republik harus melaporkan ke kantornya, dan beliau telah bertemu dengan para pemimpin pemuda daerah untuk membahas hal tersebut, dan akhirnya mendapatkan kesepakatan akan hal itu. Hamengku Buwono IX khawatir akan bangkitnya pengaruh sayap kiri dan memutuskan untuk mencegah situasi yang sama di Yogyakarta. Setelah pertemuan dengan sekitar lima puluh tokoh-tokoh pemuda terkemuka, ia memimpin parade di alun-alun untuk melantik sejumlah besar pemuda menjadi Laskar Rakyat Mataram, yang kemudian di kenal dengan Tentara Rakyat Mataram.

f. SERANGAN OEMOEM 1 MARET

Agresi militer Belanda 19 Desember 1948 jelas melukai hati rakyat. Keadaan di Yogyakarta tetap berjalan tapi tanpa ada tanda akan ada perubahan. Penderitaan rakyat yang semakin berat, kekacauan dimana-mana, dan korban kedua pihak tetap berjatuhan. Sultan Hamengku Buwono IX yang menyaksikan kajadian ini dengan cemas. Ia merasa, bahwa ketika semangat juang yang menurun tetap dibiarkan maka akan terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan perjuangan kemerdekaan. Kemudian Sultan Hamengku Buwono IX mulai memutar otak untuk mencari akal.

Pada bulan Februari 1949 masalah antara Indonesia dan Belanda akan di bicarakan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut beliau mengumumkan bahwa ia telah melepas jabatannya sebagai Sultan, beliau mengatakan kepada para pejabat Belanda. Serangan tersebut kemungkinan merupakan serangan yang paling berani dan secara simbolis merupakan yang paling signifikan, dan memainkan peran dalam meyakinkan dunia luar, para Federalis, serta pada akhirnya pihak Belanda, mengakui bahwa pergerakan kaum Nasionalis tidak bisa diatasi.

Pada pertengahan Februari, ia segera mengirimkan kurir untuk menghubungi Panglima Besar di tempat persembunyiannya, meminta persetujuannya untuk melaksanakan siasatnya dan langsung menghubungi komandan Gerilya. Kemudian

Hamengku Buwono IX berhasil mendatangkan komandan Gerilya yakni, Letnan Kolonel Soeharto. Dalam pertemuan di kompleks Keraton, yang berlangsung sekitar 13 Februari 1949, Hamengku Buwono IX menanyakan kesanggupan Lektol Soeharto untuk mempersiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu. Kemudian komandan Gerilya tersebut menyatakan kesanggupannya. Dalam satu kali pertemuan kedua tokoh ini merencanakan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Malam menjelang 1 Maret 1949, mulailah Gerilyawan dari empat penjuru sektor memasuki wilayah kota Yogyakarta melalui informasi dan petunjuk jalan dari *Sub-Wehrkreise* (SWK) 101 mengkonsolidasikan penyediaan perbekalan setiap kampung-kampung dan para relawan Kesehatan serta petunjuk sasaran (Tataq Chidmad dkk, 2001:124).

Posisi Belanda diserang serta dikunci dari empat penjuru, serta diikat sedemikian rupa sehingga tidak bisa keluar dari posisi pertahannya. Praktis saat itu di kota Yogyakarta para Gerilyawan berseliweran menguasai kota.

Setelah terjadinya Serangan Oemoem 1 Maret 1949, para awak penyiar radio PC 2 Banaran, Playen, Gunung Kidul, dengan menggunakan Morse untuk mempersiapkan pengiriman berita ke Bukittinggi. Setelah dari Bukittinggi berita langsung dikirim ke Aceh yang diterima dan dipancarkan terus ke sebuah pemancar militer Burma (Myanmar). Berita Serangan Oemoem segera dipancarkan/di-*relay* lagi ke New Delhi, dimana terdapat staf perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Pak Abu Bakar Lubis Ny. Miriam Budiharjo.

Simpulan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah otonomi setingkat provinsi yang dikepalai Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah DIY. Sultan yang menduduki takhta sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta tetap memegang pemerintahan atas daerahnya, tetapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah Papatih Dalem

Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan HB IX kemudian segera memanggil Paku Alam VIII dan K.R.T. Honggowongso yang merupakan staf senior di Kepatihan. Sultan meminta pertimbangan mengenai bagaimana sikap

Yogyakarta sebaiknya. Beliau memberikan saran bahwa sebaiknya Yogyakarta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awal tahun 1946 Ibu Kota Republik Indonesia resmi pindah ke Yogyakarta, disebabkan karena kondisi beberapa wilayah termasuk Jakarta tidak stabil. Pemerintah RI memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta meninggalkan Jakarta diikuti oleh pimpinan-pimpinan pemerintahan pusat. Banyak peran Sultan dalam mendukung upaya kemerdekaan pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adrian Vickers, 2011, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani.
- Djoko Suryo dkk., *tt.*, *Jogja Dalam Keistimewaan*, Yogyakarta, *PENDAPA Taman Siswa*.
- John Monfries, 2018, *Raja di Negara Republik*, Yogyakarta, Biography Yogyakarta.
- Julius Pour, 2012, *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat*, Yogyakarta PT. Kompas Media Nusantara.
- Moedjanto, G. 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh raja-raja Mataram*, Yogyakarta. Kanisius.
- Mohamad Roem dkk, 1982, *Tahkta Untuk Rakyat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhartono, 1994, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Yogyakarta; *Pustaka pelajar (anggota Ikapi)*.
- Suwarno, P. J. 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta. Kanisius.
- Tataq Chimad, dkk, 2011, *Serangan Oemoem 1 Maret 1949*, Yogyakarta, Universitas Janabadra.